



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI  
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN  
PERTOLONGAN/BASARNAS)**

---

|               |   |
|---------------|---|
| Tahun Sidang  | : 2020 – 2021   |
| Masa Sidang   | : III   |
| Rapat         | : Ke – 6  |
| Jenis Rapat   | : Rapat Kerja   |
| Hari/Tanggal  | : Senin, 25 Januari 2021  |
| Sifat         | : Terbuka   |
| Pukul         | : 13.00 WIB s.d 16.45 WIB   |
| Tempat        | : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI dan secara Virtual Zoom Cloud Meeting dari tempat masing-masing        |
| Acara         | : 1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020;<br>2. Membahas Program kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2021;<br>3. Dan Lain-lain |
| Ketua Rapat   | : Lasarus, S.Sos., M.Si   |
| Sekretaris    | : Nunik Prihatin Budiastuti, SH   |
| Hadir Anggota | : ... orang dari 52 orang Anggota Komisi V DPR RI secara fisik dan Virtual  |
| Hadir Mitra   | : Menteri Perhubungan beserta jajaran.  |

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pada pukul 13.00 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI Kementerian Perhubungan pada hari ini adalah membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020, Membahas Program kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2021, dan Lain-lain.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Perhubungan untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN..../Hal.2**

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perhubungan dalam APBN TA 2020:

- a. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam TA 2020 sebagai berikut:

| Kementerian             | Realisasi Keuangan<br>TA 2020 | Realisasi Fisik<br>TA 2020 |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Kementerian Perhubungan | 95,58%                        | 96,9%                      |

Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk tetap meningkatkan penyerapan anggaran di tahun-tahun mendatang.

- b. Terhadap pendanaan program/kegiatan di TA 2020 yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1,6 Triliun (4,42% dari pagu anggaran), Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan agar mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi hal ini sehingga ke depannya tidak terulang kembali.
2. Komisi V DPR RI prihatin terhadap besarnya pemotongan dan *refocusing*/realokasi APBN TA 2021 berdasarkan Surat Menteri Keuangan No S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp. 12,44 Triliun (27,22% dari total pagu anggaran Rp.45,66 Triliun) yang dapat mengganggu program/kegiatan dalam target Renstra/ RPJMN. Selanjutnya Komisi V DPR RI melalui Anggota Komisi V DPR RI yang ada di Badan Anggaran DPR RI untuk membicarakan kembali dengan Kementerian Keuangan terkait besaran pemotongan anggaran Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perhubungan dalam melakukan *refocusing*/penghematan dan realokasi belanja program/kegiatan TA 2021 untuk tetap memperhatikan Program Prioritas Nasional dan penambahan alokasi program/kegiatan Padat Karya yang memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dalam masa pandemi sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.
  4. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk melakukan tindakan preventif/mitigasi di tengah ancaman bencana alam akhir-akhir ini terhadap aset strategis Kementerian Perhubungan seperti bandara, pelabuhan, jalur kereta api dan terminal.
  5. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk mendukung kegiatan dan program yang terkait dengan konektivitas dan aksesibilitas, misalnya reaktivasi rel kereta api, menambah jumlah rambu-rambu dan Penerangan Jalan Umum, peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan serta pengawasan yang ketat terhadap kendaraan *Over Dimension Over Load* (ODOL).

6. Dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan program/kegiatan di sektor perhubungan.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.45 WIB.

MENTERI PERHUBUNGAN,

  
BUDI KARYA SUMADI

PIMPINAN RAPAT,

  
LASARUS